



► KESEJAHTERAAN WARGA

Pemkot Ubah Fokus Pengentasan Kemiskinan

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja akan mengubah upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan problem sehingga program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran. Upaya ini tidak lepas dari masih banyaknya warga miskin, meski bantuan dari pemerintah terus mengalir.

"Kami ingin agar kebijakan kami sesuai dan bisa mengatasi persoalan kemiskinan," kata Wakil Wali Kota, Heroe Poerwadi, di Balai Kota, Jumat (3/11).

Data warga miskin di Kota Jogja sesuai dengan jumlah pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) sebanyak 18.651 kepala keluarga (KK) atau 60.215 jiwa. Pemegang KMS selama ini dapat bantuan dari sisi kesehatan, pendidikan, hingga santunan kematian. Parameter yang dihitung mulai dari penghasilan, sandang, papan, pangan dan kendaraan. Penghasilan yang menjadi pemegang KMS ditetapkan maksimal Rp300.000 per bulan.

Selain itu, sebanyak 17.634 KK di Jogja juga mendapat bantuan pangan nontunai dari Kementerian Sosial. Data itu sebagian adalah pemegang KMS. Heroe mengatakan, dalam menentukan bantuan perlu dilihat kembali yang paling dibutuhkan oleh warga miskin sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Misalnya, jika yang dibutuhkan adalah tempat tinggal, pendekatannya adalah perbaikan rumah.

Jika persoalan penghasilan, harus diupayakan bantuan mendapat tambahan penghasilan. Jika persoalan pekerjaan, diupayakan pemagangan dan memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar. "Jadi fokus, kelompok mana yang perlu ditingkatkan," kata Heroe.

Heroe mengatakan, anggaran pengentasan kemiskinan 2018 sebesar Rp92 miliar. Jumlah tersebut murni dari APBD Kota Jogja, belum termasuk bantuan program dari Pemda DIY dan Pemerintah Pusat. Pihaknya sudah meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar pengentasan kemiskinan melalui satu pintu atau tidak berjalan sendiri-sendiri.

Disinggung soal berapa persen dapat menurunkan angka kemiskinan, Heroe mengaku belum bisa menyebutkan karena Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 masih dibahas di Dewan. Diketahui data kemiskinan tahun ini masih di angka 8,7%. "Nanti kalau sudah ada angka kesepakatan pengurangan kemiskinan lima tahun ke depan, lalu kami *breakdown* per tahun target pengurangan kemiskinan," ujar Heroe. Ia berharap, RPJMD bisa selesai dibahas sebelum akhir bulan.

Belas Kasihan
 Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto mengapresiasi upaya Pemerintah Kota

Jogja yang berikad mengubah pendekatan pengentasan kemiskinan. Ia menilai sejauh ini pengentasan kemiskinan tidak menyentuh pemberdayaan. "Banyak bantuan yang digelontorkan tapi itu sifatnya hanya belas kasihan, bukan pemberdayaan, sehingga tidak membuat perekonomian keluarga yang dibantu bergerak" kata dia.

Karena itu ia mengatakan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat RPJMD mengusulkan agar pendekatan pengentasan kemiskinan diubah, bukan fokus pada bantuan, melainkan pada pemberdayaan.

Target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD 2017-2022, dari 7,7% menurun menjadi 7,58% di tahun depan, kemudian menjadi 7,35% (2019), 7,34% (2020), 7,29% (2021) dan 7,1% (2022). (Ujang Hasanudin)

Warga Miskin di Jogja

Berdasarkan kartu menuju sejahtera (KMS)

- Kepala Keluarga 18.651 KK
- Jiwa 60.215 orang

Penghasilan pemegang KMS

- Ditetapkan maksimal Rp300.000 per bulan.

Bantuan Pangan Nontunai

- Sasaran 17.634 KK

Anggaran pengentasan kemiskinan

- Pada 2018 dianggarkan Rp92 miliar

Target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD 2017-2022

2017	2018	2019	2020	2021	2022
7,7%	7,58%	7,35%	7,34%	7,29%	7,1%

Sumber: Pemkot Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 25 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005